

**Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan**  
*Volume 13 Nomor 1, Februari 2019 Hal 14 - 22*  
**ISSN 2088-5008**

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG)  
TERHADAP FINANCIAL SHENANIGANS  
(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017)**

**Hana Fadhilah**

*STIE Ekuitas Bandung*

hana\_fadhilah22@yahoo.com

**ABSTRAK**

Objek dari penelitian ini adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel independen, serta *Financial Shenanigans* sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Financial Shenanigans*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pengujian hipotesis. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah tahun 2015-2017. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis uji-F menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang diproksi dengan komisaris independen, komite audit, dewan pengawas syariah, rapat komisaris, rapat komite audit, dan rapat dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *Financial Shenanigans* yang diukur dengan *discretionary accruals*.

Hasil analisis uji-t menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang diproksi dengan rapat komite audit dan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *Financial Shenanigans* sedangkan komisaris independen, komite audit, dewan pengawas syariah, dan rapat komisaris tidak berpengaruh terhadap *Financial Shenanigans*.

**Kata Kunci:** *Financial Shenanigans, Islamic Corporate Governance* (ICG)

**PENDAHULUAN**

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diprediksi akan berada dikisaran 5 – 5,4%, yang disumbang dari kegiatan konsumsi dan investasi. Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga sempat menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan negara-negara besar lain di ASEAN (Deny, 2019). Salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan dalam bidang ekonomi adalah bank.

Bank berperan penting dalam hal peningkatan perekonomian, terutama setelah dibentuknya UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah suatu organisasi yang tugasnya adalah

mengumpulkan dana dan menyerahkan kembali kepada orang-orang dalam bentuk pinjaman atau lainnya, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU No.10 Tahun 1998). Dengan adanya bank, masyarakat diberikan kemudahan dalam melaksanakan investasi dan konsumsi, yang nantinya secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi.

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan prinsip bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan aturan syariat Islam.

Negara sebagai pelopor yang melaksanakan sistem perbankan syariah adalah Pakistan, yaitu tahun 1940. Selanjutnya, tahun 1985 pemerintah Pakistan mencoba untuk mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya menjadi sistem perbankan syariah. Kehadiran bank syariah di Indonesia terhitung masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990. Pihak yang mendirikan bank syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia.

Saat ini, perkembangan bank syariah di Indonesia masih belum sesuai harapan, dimana Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tidak menjamin laju perkembangan bank syariahnya cepat. Selain itu, bank syariah yang dimana kegiatan operasionalnya berdasarkan pada syariat Islam, pada kenyataannya masih banyak bank syariah yang melakukan kecurangan.

Kecurangan terjadi karena adanya pemisahan fungsi antara pemilik dengan pihak pengelola dana. Hal ini akan rentan terhadap konflik keagenan, dimana agen lebih banyak mengetahui dan mendalami kondisi perusahaan. Kondisi ini berdampak kepada *agent* untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan pihak *principal* (Jensen and Meckling, 1976).

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus kecurangan yang menyeret bank syariah. Pada tahun 2013, terjadi kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh karyawan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor. Modus yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kredit fiktif untuk perumahan atau bisnis properti menggunakan 197 debitur, dimana 113 debitur adalah fiktif. Total kredit yang dicairkan adalah sebesar Rp102 Miliar, dimana Rp43 Miliar telah dikembalikan kepada BSM sehingga sisa kerugiannya berkisar Rp59 Miliar. Pencairan kredit tersebut dimulai sejak tahun 2011, namun baru terungkap pada tahun 2013. Karena adanya kredit fiktif tersebut, maka pendapatan bunga pada laporan keuangan BSM menjadi *overstated* (Anggriawan, 2013).

Pada tahun 2018, terjadi kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh tiga pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bandung. Modus ini dilakukan dengan cara menggelembungkan aset dan piutang sebesar Rp1,1 Triliun untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp1,83 Triliun. Tiga pejabat bank dianggap lalai karena mereka tidak memverifikasi kredit dengan benar (Ramadhan, 2018).

Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa bank telah melakukan *financial shenanigans*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dengan cara menyembunyikan atau mendistorsikan kondisi

keuangan. Adanya *financial shenanigans* diduga karena bank syariah belum melaksanakan *Islamic Corporate Governance* (ICG), yaitu suatu mekanisme tata kelola yang berdasarkan pada prinsip syariah. Pada dasarnya, ICG hampir sama dengan *corporate governance* pada umumnya, hanya saja ICG mengacu pada nilai-nilai syariat Islam. ICG ini seperti perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan model *stakeholder* dalam *good corporate governance* (Asrori, 2014).

Volker (2003) dalam Asrori (2014) mengungkapkan dua kekurangan dari ICG, yaitu (1) manajemen pada bank tidak dapat menjamin kepatuhan syariah pada setiap produk dan layanan yang disediakan terhadap deposit investasi, (2) manajemen bank syariah tidak dapat menjamin risiko perlindungan keuangan kepada pemangku kepentingan, investor dan deposit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Financial Shenanigans* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017)”**.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Jensen and Meckling (1976) mengembangkan teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa jika perusahaan memisahkan bagian pengelola dengan pemilik akan rentan terhadap konflik keagenan. Pemicu konfliknya adalah terkait dengan pencarian dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan. Konsep teori agensi merupakan hubungan atau kontrak antara *principal* dengan *agent*. *Principal* adalah pemegang saham sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Principal* mempercayakan *agent* untuk dapat mengelola dana yang telah diberikan *principal*. Maka dari itu, *agent* diangkat oleh *principal* harus bertindak untuk kepentingan *principal*. Namun, hubungan *agent* dan *principal* tidak selalu berjalan lancar. Adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dalam mengelola perusahaan menimbulkan masalah agensi (*agency problem*).

Pada dasar teori ini berlandaskan pada kenyataan bahwa antara *principal* dan *agent* dihadapkan pada ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*), dimana *agent* lebih banyak mengetahui dan mendalami kondisi perusahaan. Kondisi ini berdampak kepada *agent* untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan pihak *principal*, yang biasa disebut dengan cacat moral (*moral hazard*). Sasaran utama dari pemegang saham adalah untuk memperoleh pengembalian (*return*) saham atas investasi mereka. Besar kecilnya *return* saham tergantung dari laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham mengandalkan laporan keuangan perusahaan sebagai sumber informasi kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan.

*Islamic Corporate Governance* (ICG), yaitu tata kelola yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Pada dasarnya, ICG hampir sama dengan *corporate governance* pada umumnya, hanya saja ICG mengacu pada nilai-nilai syariat Islam. ICG ini seperti perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan model *stakeholder* dalam *good corporate governance* (Asrori, 2014). Merujuk pada pernyataan tersebut, lebih lanjut Hasan (2008) mengembangkan model tata kelola perusahaan pemangku

kepentingan Islam. Dia menjelaskan bahwa organ utama ICG adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertanggung jawab menasehati dan mengawasi kepatuhan syariah, berkewajiban untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan patuh terhadap prinsip-prinsip Islam. Fokus utama dari ICG adalah bagaimana caranya agar perusahaan, dalam hal ini khususnya para pemangku kepentingan bank syariah dapat mematuhi prinsip-prinsip Islam.

DPS adalah suatu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Unit Bisnis Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota DPS harus memiliki keahlian di bidang syariah dan juga memiliki kompetensi di bidang perbankan (Arifin, 2003). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertugas untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi, khususnya sektor keuangan. Otoritas DSN mengeluarkan fatwa mengenai jenis kegiatan, produk dan layanan keuangan Islam serta mengawasi pelaksanaan fatwa oleh lembaga keuangan Islam di Indonesia melalui DPS (Ari, 2003).

*Financial shenanigans* yaitu suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dengan cara menyembunyikan atau mendistorsikan kondisi keuangan. Biasanya yang rentan terhadap tindakan *financial shenanigans* adalah akuntansi basis akrual karena terdapat banyak *judgment* dan estimasi di dalam pelaporannya. Motivasi perusahaan melakukan *overstated earning* diantaranya adalah agar perusahaan tetap terlihat baik di mata investor, memenuhi kontrak hutang dan meningkatkan insentif kompensasi *shareholders* kepada manajemen. Beberapa skenario *financial shenanigans* yang lainnya seperti :

- a. Mencatat pendapatan yang *premature* atau kualitasnya di ragukan
- b. Mencatat pendapatan fiktif
- c. Melakukan *one-time transaction* untuk menciptakan *gain*
- d. Menunda pendapatan periode ini untuk di catat di periode berikutnya
- e. *Aggressive accounting policies*

ICG adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Adanya prinsip-prinsip ICG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat meminimalisasi dan mencegah manajer melakukan tindakan *financial shenanigans*. Jika perusahaan menjalankan sistem sesuai dengan yang ditentukan, maka para pemegang saham dapat memperoleh kembali investasinya serta para manajer tidak dapat bertindak sesuatu yang dapat merugikan pemegang saham.

Kodriyah (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial shenanigans* sedangkan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial shenanigans*. Felicia dan Imam (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial shenanigans* sedangkan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial shenanigans*.

Perusahaan yang memiliki jumlah anggota komite audit yang tinggi memiliki risiko melakukan *financial shenanigans* yang lebih rendah.

Tulus (2014) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial shenanigans* sedangkan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *financial shenanigans*. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu untuk mengurangi indikasi *financial shenanigans* di bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghayad (2008), Setiawati (2010) dan Anwar (2011) yang mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang telah berfungsi dengan baik mampu mengurangi praktik *financial shenanigans* di bank syariah. Namun, hasil penelitian Kodriyah (2017) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *financial shenanigans*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah metode studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yaitu studi yang menjelaskan mengenai sifat dari suatu hubungan tertentu atau menentukan perbedaan antara dua atau lebih faktor dari kelompok atau variabel independen dalam situasi tertentu. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memprediksi hasil dari organisasi atau menjelaskan varians dalam variabel dependen (Sekaran dan Bougie, 2010).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah tahun 2015-2017. Metode *sampling*-nya adalah *purposive sampling*, yaitu teknik yang melibatkan pemilihan subjek yang ditempatkan paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Teknik ini digunakan ketika jumlah atau kategori sampel yang memiliki informasi terbatas dan pemilihan anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti.

Kriteria sampelnya adalah :

- a. Bank umum syariah yang terdaftar dari tahun 2015-2017.
- b. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan 2015–2017, yang dapat diakses melalui situs website masing-masing perusahaan. Artinya, informasi yang terkandung dalam laporan tahunan dapat diakses.
- c. Perusahaan memiliki data lengkap yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diambil dari laporan tahunan bank umum syariah tahun 2015-2017. Data sekunder ini adalah data yang telah diproses oleh perusahaan dan telah dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan, atau dengan kata lain data tidak langsung diambil dari perusahaan yang bersangkutan dan diperoleh dari website masing-masing perusahaan.

Penulis menggunakan pengujian secara kuantitatif guna mendukung besarnya pengaruh *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Financial Shenanigans*. Penelitian ini terdiri dari 1

(satu) variabel independen yang diproksi oleh 6 (enam) indikator dan 1 (satu) variabel dependen sehingga digunakan analisis regresi linier berganda.

Agustina (2018) mengembangkan suatu model untuk mengukur *Islamic Corporate Governance* (ICG) menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu :

a. Komisaris Independen

$$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Komisaris}}$$

b. Komite Audit

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

c. Dewan Pengawas Syariah

$$DPS = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

d. Rapat Komisaris

$$RK = \sum \text{Rapat Komisaris}$$

e. Rapat Komite Audit

$$RKA = \sum \text{Rapat Komite Audit}$$

f. Rapat Dewan Pengawas Syariah

$$RDPS = \sum \text{Rapat Dewan Pengawas Syariah}$$

Dechow et al. (1995) memodifikasi model Jones (1991) dalam mengukur *financial shenanigans*. Rumus lengkap model Dechow adalah sebagai berikut :

a. Menghitung Total Akrual (TA) di mana tahun laba bersih dikurangi arus kas operasi tahun t dengan rumus berikut :

$$TA = NI_{it} - CFO_{it}$$

b. Selanjutnya, Total Accrual (TA) diperkirakan oleh Ordinary Least Square sebagai berikut :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

c. Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka Non Discretionary Accruals (NDA) ditentukan oleh rumus sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

- d. Terakhir, Discretionary Accruals (DA) sebagai ukuran kecacauan keuangan ditentukan dengan rumus berikut :

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

## PEMBAHASAN

Tabel 1  
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,627	6	,104	4,244	,003 <sup>b</sup>
	Residual	,714	29	,025		
	Total	1,340	35			

a. Dependent Variable : DA<sub>it</sub>

b. Predictors: (Constant) : KI, KA, DPS, RK, RKA, RDPS

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah 4,244 dengan tingkat signifikansi 0,003. Karena  $0,003 < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa komisaris independen, komite audit, dewan pengawas syariah, rapat komisaris, rapat komite audit dan rapat dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap DA<sub>it</sub>.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Dari hasil perhitungan menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,244 > 2,43$ ), maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

Tabel 2  
Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,019	,226		,085	,933
	KI	-,200	,191	-,148	-1,047	,304
	RK	,001	,004	,049	,342	,735
	KA	-,005	,017	-,049	-,321	,751
	RKA	-,013	,005	,358	-2,459	,020
	DPS	,086	,063	,209	1,351	,187
	RDPS	-,026	,007	-,505	-3,574	,001

a. Dependent Variable: DA<sub>it</sub>

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa koefisien regresi untuk komisaris independen adalah -0.200. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap DA<sub>it</sub>. Jumlah  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,047 < 1,699$ ) yang artinya  $H_0$  diterima. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa

komisaris independen dan DAit memiliki probabilitas signifikansi  $0,304 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap DAit.

Koefisien regresi untuk rapat komisaris adalah 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa rapat komisaris memiliki pengaruh positif terhadap DAit. Jumlah  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,342 < 1,699$ ) yang artinya  $H_0$  diterima. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris dan DAit memiliki probabilitas signifikansi  $0,735 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap DAit.

Koefisien regresi untuk komite audit adalah -0,005. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap DAit. Jumlah  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,321 < 1,699$ ) yang artinya  $H_0$  diterima. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa komite audit dan DAit memiliki probabilitas signifikansi  $0,751 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap DAit.

Koefisien regresi untuk rapat komite audit adalah -0,013. Hal ini menunjukkan bahwa rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap DAit. Jumlah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,459 > 1,699$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rapat komite audit dan DAit memiliki probabilitas signifikansi  $0,02 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap DAit.

Koefisien regresi untuk dewan pengawas syariah adalah 0,086. Hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap DAit. Jumlah  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,351 < 1,699$ ) yang berarti  $H_0$  diterima. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah dan DAit memiliki probabilitas signifikansi  $0,187 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap DAit.

Koefisien regresi untuk rapat dewan pengawas syariah adalah -0,026. Hal ini menunjukkan bahwa rapat dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif terhadap DAit. Jumlah  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $3,574 > 1,699$ ) yang artinya  $H_0$  diterima. Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rapat dewan pengawas syariah dan DAit memiliki probabilitas signifikansi  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap DAit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* yang diproksi dengan komisaris independen, komite audit, dewan pengawas syariah, rapat komisaris, rapat komite audit, dan rapat dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *financial shenanigans*. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel rapat komite audit dan rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *financial shenanigans* sedangkan variabel komisaris independen, komite audit, dewan pengawas syariah, dan rapat komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial shenanigans*.



## DAFTAR REFERENSI

- Asrori. (2014). *Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.6, No.1, Maret 2014.
- Atiqah dan Yusro. (2018). *Islamic Corporate Governance and Islamic Social Responsibility Towards Maqashid Shariah*. International Conference on Islamic Finance, Economics and Business, Vol.2018.
- Dony Indra Ramadhan. (2018). *Kredit Fiktif Rp1,83 T, Pejabat Bank Didakwa 20 Tahun Bui*. news.detik.com.
- Dwi Sudaryati dan Yunita Eskadewi. (2012). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.11, No.1, September 2012.
- Eva Rosa Dewi dan Moh. Khoiruddin. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013*. Management Analysis Journal, Vol.5, No.3, 2016.
- Fiddy Anggriawan. (2013). *Kredit Fiktif Bermodus Pengajuan Pembiayaan Perumahan*. [www.okezone.com](http://www.okezone.com).
- Imam Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*, Edisi 6. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. (1976). *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Elsevier, Vol.3(4), Pp.305-360.
- Sekaran, Uma and Bougie, Roger. (2010). *Research Methods for Business : A Skill Building Approach, Fifth Edition*. United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd.
- Septian Deny. (2019). *Gubernur BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,4 Persen di 2019*. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Tulus Suryanto. (2014). *Manajemen Laba pada Bank Syariah di Indonesia : Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah*. Jurnal Kinerja, Vol.18, No.1, 2014.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.